

Peran Indonesia dalam Upaya Penyelesaian Kudeta Militer Myanmar Tahun 2021

Dinda S. F^{1*}, Muhammad Yusra,^{2*} Silvi Cory,^{3*}

Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Andalas, Padang, Indonesia.

E-mail: ¹dindasuryafauzi7@gmail.com*, ²muhammadyusra@fisip.unand.ac.id*,
³silvicory.sc@gmail.com*

Abstract

When there is a coup and crimes against humanity against the people of Myanmar, ASEAN should take quick action to solve the problem. Yet that hampered due to difference opinion among ASEAN member Countries. Countries that should be proactive in solving problems that occur in Myanmar have instead chosen not to intervene and did not make any comments about that. Indonesia as the closest country with Myanmar in the ASEAN region has a role in solving the issues of Myanmar Military Coup that happened in 2021. This research aims to describe the role of Indonesia in solving Myanmar Military Coup in 2021. To see Indonesian role, this study was analyzed using national role conception by K.J. Holsti through 17 variations of national role conceptions that consist. this study discovered that Indonesia has a role as regional protector which seen from the encouragement of solving problems in Myanmar by Indonesia at the Indonesia-Myanmar bilateral meeting, Indonesia as the initiator of ALM, Indonesia as stability guard, peace guard, and the security guard of the ASEAN region, and manifestation of the independent and active foreign policy principle. Indonesia also have a role as mediator-integrator, which seen from the shuttle diplomacy which conducted by Indonesia to ASEAN member Counties, and meditation carried out through communication between the Myanmar Military and CRPH.

Keywords: *Indonesian Role, Myanmar, Military Coup.*

PENDAHULUAN

Myanmar merupakan negara anggota ASEAN yang mendapatkan banyak perhatian dari dunia internasional akibat dari kudeta yang dilakukan oleh junta militer pada tanggal 1 Februari 2021. Permasalahan politik Myanmar tersebut menjadi salah satu topik pembicaraan dalam pertemuan bilateral antara Indonesia dan Malaysia pada 5 Februari 2021. Indonesia melalui presiden Joko Widodo meminta agar menteri luar negeri Indonesia dan Malaysia berbicara kepada ketua ASEAN agar dilakukannya pertemuan khusus untuk membahas

isu ini dan hal tersebut disetujui oleh Perdana Menteri Muhyiddin Yassin (Setkab, 2021).

Indonesia memiliki peran aktif sebagai mediator dalam penyelesaian permasalahan yang ada di ASEAN. Beberapa peran aktif Indonesia diantaranya adalah penyelesaian permasalahan konflik Filipina selatan antar kelompok separatist MNLF (*Moro National Liberation Force*) dengan pemerintah Filipina pada tahun 1996 dan mewujudkan sebuah perjanjian akhir atau *Final Peace Agreement 1996* antar keduanya (Alunaza & Anggara, 2018). Indonesia juga berperan sebagai mediator dan fasilitator dalam penyelesaian permasalahan kepemilikan Candi Preah Vihear antar Thailand dan Kamboja pada tahun 2011 (Antuli, Heyadi, & Rezasyah, 2019). Peran di atas membuktikan bahwa Indonesia memiliki pengaruh yang besar di ASEAN, sehingga dijuluki sebagai *Primus Inter Pares* di kawasan (Acharya, 2014). *Primus inter pares* merupakan frasa yang berasal dari bahasa latin yang bermakna “yang pertama diantara yang setara”.

Dalam kasus Myanmar, Indonesia merupakan negara yang memiliki hubungan paling dekat dengan Myanmar di ASEAN. Kedekatan antar keduanya semakin kuat ketika Indonesia menawarkan bantuan teknis dalam penyelenggaraan pemilu dengan melakukan pertukaran informasi mengenai proses transisi demokrasi yang dilakukan melalui *Bali Democracy Forum* (BDF), *The ASEAN Inter-parliamentary Myanmar Caucus* (AIPMC), ikut sertanya Myanmar dalam *Institute for Peace and Democracy* dan menjadi observer dalam pemilihan umum di Myanmar (Dermawan, 2016). Selain itu, Indonesia menjadi satu-satunya negara yang dapat berdialog dengan Myanmar terkait upaya penyelesaian genosida terhadap etnis Rohingya pada tahun 2017 yang menghasilkan terbentuknya satgas *ad hoc* dan diterima dengan tangan terbuka oleh Myanmar (Setiawan & Suryanti, 2021).

Kudeta militer yang terjadi di Myanmar pada tanggal 1 Februari 2021 merupakan proyeksi dari rasa tidak terima junta atas angka kemenangan suara yang terlalu signifikan antar partai oposisi dan partai junta. Hal ini dapat dilihat

dari Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang memperoleh suara mencapai 82% sedangkan partai bagi junta militer yakni Union Solidarity and Development Party (USDP) hanya memperoleh 6% dari akumulasi suara (idntimes, n.d.). Junta militer menilai bahwasanya terjadi kecurangan pada pemilihan umum yang dilaksanakan pada 8 November 2020. Namun, komisi pemilihan umum Myanmar mengatakan bahwa tidak terdapat bukti dari tuduhan yang dilemparkan oleh junta. Hal ini kemudian menjadi landasan bagi junta untuk menggulingkan presiden terpilih Aung San Suu Kyi dan merebut kuasa atas pemerintahan di Myanmar secara sepihak. Junta militer yang diketuai oleh Jendral Min Aung Hlaing kemudian mengumumkan status darurat di Myanmar serta mendeklarasikan diri sebagai pemimpin baru Myanmar (Saputra, 2021)

Kudeta yang terjadi mengakibatkan demonstrasi besar-besaran di Myanmar hingga memakan korban jiwa. Tercatat pada tanggal 11 April 2021 terdapat 701 korban jiwa yang diakibatkan oleh kudeta. Kejahatan kemanusiaan yang dilakukan oleh junta militer tersebut mendapat respons berbeda dari negara anggota ASEAN. Terdapat tiga bentuk respons dari negara-negara anggota ASEAN diantaranya Indonesia, Malaysia, dan Singapura sebagai negara yang menolak kekerasan dan bahkan mengecam tindakan junta. Kedua yaitu Filipina, Kamboja, dan Thailand menganggap bahwasanya permasalahan yang terjadi di Myanmar merupakan permasalahan internal yang tidak boleh diintervensi. Sementara itu Laos, Vietnam, dan Brunei Darussalam merupakan negara yang memilih untuk tidak memberikan komentar terkait permasalahan yang terjadi di Myanmar (BBC, 2021).

Respons Indonesia terhadap kudeta Myanmar melalui Menteri Luar Negeri, Retno Marsudi, menyatakan bahwa “Indonesia memilih untuk tidak berdiam diri. *To do nothing is not an option.*” (Kemlu, 2021). Oleh karena itu, Indonesia menjadi negara pertama yang menginisiasi pertemuan pemimpin negara di ASEAN untuk membicarakan permasalahan yang ada di Myanmar. Indonesia merupakan satu-satunya negara yang melakukan *shuttle diplomacy*

terhadap negara anggota ASEAN dengan tujuan menghasilkan suatu keputusan yang sama dalam penyelesaian masalah kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Dalam upayanya, pada tanggal 16-17 Februari 2021 Indonesia melakukan kunjungan dan dialog bilateral kepada Brunei Darussalam selaku ketua ASEAN yang membahas mengenai permasalahan Myanmar, keesokan harinya Indonesia melakukan kunjungan ke Singapura dengan bahasan yang sama (Kemlu, Kunjungan Menlu RI Ke Brunei Darussalam, 2021). Indonesia juga melakukan pertemuan bilateral dengan Thailand sekaligus pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Myanmar yang dipilih oleh Junta yang saat itu berada di Bangkok pada tanggal 24 Februari 2021 untuk membahas permasalahan serupa serta pembahasan mengenai persiapan pertemuan kepala pemerintahan ASEAN.

Upaya *shuttle diplomacy* yang dilakukan Indonesia berhasil mewujudkan pertemuan pertama bagi para pemimpin ASEAN secara langsung selama pandemi. Indonesia menjadi negara yang memfasilitasi pertemuan tersebut pada tanggal 24 April 2021 di Jakarta setelah Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah selaku ketua ASEAN mengundang negara anggota untuk melakukan *ASEAN Leaders Meeting* atau ALM (Setkab, Diprakarsai Indonesia, Pemimpin ASEAN Akan Gelar Pertemuan Bahas Situasi Di Myanmar, 2021). Terdapat 6 pemimpin negara ASEAN yang menghadiri ALM yakni: PM Kamboja, PM Vietnam, PM Malaysia, PM singapura, Presiden RI, dan Sultan Hassanal Bolkiah. Sementara itu, Filipina, Laos dan Thailand hanya mengutus menteri luar negeri mereka dikarenakan alasan tertentu. Pertemuan ini juga dihadiri oleh panglima militer Myanmar Min Aung Hlaing. Pertemuan yang dilakukan kemudian menghasilkan lima poin konsensus yang bertujuan untuk menghentikan dan menekan junta militer untuk tidak menyakiti masyarakat sipil Myanmar. Keberhasilan Indonesia dalam mengajak negara anggota ASEAN untuk menghasilkan lima poin konsensus menjadikan Indonesia sebagai negara yang berperan dalam upaya penyelesaian permasalahan kudeta Myanmar tahun

2021. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan peran Indonesia dalam upaya penyelesaian kudeta militer Myanmar pada tahun 2021.

METODE

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif sebagai pendekatan penelitian dengan cara mengumpulkan data melalui sumber data sekunder dan memiliki sifat deskriptif analitis. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif analisis karena akan menjelaskan mengenai bagaimana peran Indonesia dalam upaya penyelesaian kudeta militer Myanmar yang diperoleh melalui sumber yang dapat dipercaya. Pada penelitian ini, ruang lingkup dan data penelitian dibatasi dalam kurun waktu februari 2021- Maret 2022. Periode ini dipilih karena Februari merupakan awal terjadinya kudeta militer Myanmar hingga akhir penggunaan data guna penelitian. Unit analisis dalam penelitian ini adalah peran Indonesia, sedangkan unit eksplanasi penelitian merupakan upaya penyelesaian kudeta militer Myanmar pada tahun 2021 yang dilakukan oleh Indonesia. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik *library research* atau melalui sumber data sekunder yakni dengan mengumpulkan data berasal dari artikel *report* yang dikeluarkan oleh ALTSEAN-BURMA dan AAPP atau *Assistance Association for Political Prisoners (Burma)*, jurnal *Asia-Pacific Journal: Japan Focus*, pernyataan pers dari situs resmi yang dipublikasikan oleh setkab.go.id dan kemlu.go.id, dan berita *online* yang berasal dari banyak sumber seperti The Diplomat, Sindo, BBC News, CNN dan lainnya yang menyediakan data yang relevan dan sesuai dengan penelitian ini.

Peranan Nasional

Peranan nasional merupakan sebuah tindakan yang didasari atas kebijakan luar negeri suatu negara. Apabila suatu negara tengah berada dalam permasalahan regional ataupun internasional maka negara tersebut akan

menetapkan posisinya dalam permasalahan tersebut. Kalevi Jaakko Holsti mendefinisikan peran nasional sebagai: (Holsti, 1970.)

“General foreign policy behavior of governments. It include patterns of attitudes, decisions, response, functions and commitment towards other states ... national role conceptions includes the policymakers' own definitions of the general kinds of decisions, commitments, rules and actions suitable to their state, and of the functions, if any, their state should perform on a continuing basis in the international system or in subordinate regional systems”

Dari penjelasan Holsti di atas, penulis memahami bahwa peran nasional merupakan perilaku umum suatu negara terhadap negara lain yang mencakup pola sikap, respons, keputusan, fungsi, dan komitmen mereka. Tidak hanya itu, peran nasional juga mencakup definisi yang dimiliki oleh para pembuat kebijakan itu sendiri terkait jenis jenis keputusan umum, komitmen, aturan dan tindakan mereka yang sesuai dengan negara mereka, maupun fungsinya bagi negara mereka sendiri. Apabila hal tersebut sesuai dengan negara dan juga juga berfungsi bagi negara mereka maka peran nasional harus dilakukan secara berkelanjutan di dalam sistem internasional atau di sistem yang lebih rendah.

Naomi Bailin Wish mendefinisikan konsep peran nasional atau *National Role Conception* sebagai persepsi pembuat kebijakan luar negeri terhadap posisi negaranya dalam sistem internasional, hal tersebut mencakup persepsi umum mengenai jenis umum keputusan, aturan, komitmen, dan fungsi jangka panjang dalam posisi internasional tersebut (Wish, 2014). Kemudian, Wehner dan Thies mendefinisikan peran sebagai kombinasi dari konsepsi diri dan pengakuan sosial yang ditetapkan oleh orang lain (Wehner & Thies, 2014.). Sehingga dapat disimpulkan bahwa konsep peran nasional merupakan hasil dari perilaku umum yang dilakukan oleh suatu negara ke negara lain guna menempatkan posisinya di sistem internasional baik itu melalui pengakuan negara itu sendiri maupun pengakuan yang diberikan oleh negara lain.

Layaknya peranan atau identitas seseorang dalam sebuah komunitas atau dalam sebuah institusi, negara juga memiliki banyak identitas dalam sistem internasional. Peranan nasional atau identitas telah di jelaskan oleh Holsti berdasarkan tingkat kepasifan atau aktivitas suatu negara dalam kebijakan luar

negerinya. Dalam buku yang berjudul “*National Role Conception in the Study of Foreign Policy*” Holsti memaparkan bahwa terdapat 17 variasi peranan nasional, di antaranya :

1. *Bastion of revolution-liberator*

Pada peranan ini, beberapa pemerintah percaya bawasannya mereka memiliki tugas dalam mengatur atau memimpin berbagai jenis gerakan revolusi di luar negeri.

2. *Regional leader*

Disini peranan negara merujuk pada tanggung jawab atau tugas khusus yang dirasakan oleh suatu pemerintah untuk dirinya sendiri yang didasari oleh hubungan sebuah negara dengan negara lain di kawasannya. Dengan kata lain, regional leader merupakan peran yang dilakukan oleh negara karena status tertulisnya sebagai pemimpin dalam wilayah tertentu atau sektor tertentu.

3. *Regional protector*

Meskipun terkesan seperti merujuk pada tanggung jawab suatu kepemimpinan atau pemimpin di suatu kawasan, namun dalam peranan ini tanggung jawab dan kepemimpinan hanya hanya tersirat. peranan negara pada *regional protector* menekankan pada pentingnya memberikan perlindungan bagi wilayah kawasan.

4. *Active independent*

Dalam peran ini menekankan pentingnya peningkatan keikutsertaan negara dalam hubungan diplomatik dengan negara-negara lain sebanyak mungkin dan menjadi penengah dalam kasus konflik antar blok.

5. *Liberation supporter*

Berbeda dengan peran pertama yakni *bastion of the revolution*, peran ini tidak menunjukkan tanggung jawab formal untuk memimpin, mengorganisir, ataupun secara fisik memberikan dukungan gerakan pembebasan di luar negeri. Dalam perannya sikap dan tindakan mereka tidak jelas, dan tidak terstruktur.

6. *Anti imperialist agent*

Peran negara disini sebagai ‘agen’ yang memperjuangkan kejahatan imperialisme.

7. *Defender of the faith*

Beberapa pemerintah memandang bahwa tujuan dan komitmen kebijakan luar negeri mereka adalah mempertahankan sistem nilai bukan dari serangan. Mereka berperan dan bertanggung jawab sebagai penjamin kemurnian ideologis bagi negara lain.

8. *Mediator-integrator*

Pada peran ini, negara merasa dan menganggap bahwa mereka mampu atau bertanggungjawab dalam memenuhi atau melakukan tugas khusus sebagai penengah untuk mendamaikan ataupun menyelesaikan konflik di negara lain. Dalam kasus ini mereka percaya dan menganggap bahwa mereka merupakan penyelesai masalah di regional ataupun global.

9. *Regional-subsistem collaboration*

Disini negara berperan sebagai kolaborator yang membangun komitmen jangka panjang dalam upaya kerja sama agar dapat membentuk dan membangun komunitas yang lebih luas, bersatu, bekerja sama, dan berintegrasi.

10. *Developer*

Peran negara bertugas atau memiliki kewajiban tertentu guna membantu negara-negara berkembang.

11. *Bridge*

Konsepsi peran negara sebagai jembatan ini cenderung kabur, jika telah mengeluarkan kebijakan pun tidak dapat terlihat dengan jelas. Peran ini biasanya menyiratkan fungsi komunikasi, penerjemah, atau pembawa pesan dan informasi.

12. *Faithful ally*

Apabila pembuat suatu kebijakan menyatakan bahwa mereka akan mendukung sekutu dengan berbagai macam cara namun, mereka tidak akan terlalu mengharapkan bantuan layaknya yang mereka berikan kepada pihak lain.

13. *Independent*

Dalam perannya mereka hanya melakukan tindakan dan mengejar kepentingan nasional mereka. Apabila tidak terdapat kepentingan nasional mereka di dalamnya mereka tidak akan bertindak ataupun menjalankan fungsi apapun disistem internasional.

14. *Example*

Peran ini menekankan pentingnya mempromosikan prestise dan juga mendapatkan pengaruh di sistem internasional dengan cara menjadi contoh atau teladan bagi negara-negara lain.

15. *Internal development*

Konsepsi peranan ini menekankan bahwa kepentingan utama negara adalah membangun negaranya sendiri. terdapat partisipasi yang rendah pada peran negara ini namun, hal tersebut tidak menghalangi kerja sama internasional terutama dalam bidang ekonomi dan teknis.

16. *Isolate*

Peran nasional terakhir ini menuntut untuk seminimal mungkin melakukan kontak dengan dunia internasional dalam bentuk apapun.

17. *Protectee*

Konsepsi peranan ini bukan merujuk pada peran negara namun lebih merujuk pada posisi suatu negara. dalam konsepsi ini negara tidak menunjukkan orintasi, fungsi dan tugasnya pada lingkungan eksternal namun menyinggung tanggung jawab negara lain untuk membela mereka.

Dari tujuh belas variasi peranan nasional dalam sistem internasional yang dipaparkan oleh Holsti di atas. Dari 17 peran diatas nantinya penulis akan menganalisis dengan cara mengkaitkannya dengan kebijakan luar negeri yang dilakukan oleh Indonesia dalam upayanya untuk menyelesaikan kudeta militer Myanmar. Sebelum melakukan analisis, peneliti terlebih dahulu akan memahami konsep yang dikemukakan oleh Holsti dengan mendalami pengertian dan menginterpretasikan makna dari variasi peranan nasional melalui contoh yang diberikan oleh Holsti dalam artikel yang ia keluarkan.

Kemudian, peneliti akan mengumpulkan kebijakan-kebijakan apa saja yang telah dikeluarkan oleh Indonesia dan mengurut kebijakan tersebut secara kronologi waktu guna memetakan kebijakan apa saja yang telah dilakukan oleh Indonesia yang bertujuan untuk mempermudah pemahaman terkait peranan Indonesia dalam upaya penyelesaian kudeta militer Myanmar tahun 2021. Setelah melaksanakan penelitian penulis akan mengkategorisasikan kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh Indonesia dengan variasi peranan milik Holsti. Setelah melaksanakan penelitian, penulis menemukan bahwasannya dalam upaya penyelesaian kudeta militer Myanmar tahun 2021 Indonesia memiliki 2 peranan di dalamnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan nasional merupakan tindakan yang didasari oleh kebijakan luar negeri suatu negara. Peranan nasional bagi Wehner dan Thies merupakan kombinasi konsepsi diri suatu negara dan juga pengakuan yang diberikan oleh orang lain (Wehner & Thies, 2014.). Di sisi lain, Naomi Bailin Wish mendefinisikan konsep peran nasional atau *National Role Conception* sebagai persepsi pembuat kebijakan luar negeri terhadap posisi negaranya dalam sistem internasional, hal tersebut mencakup persepsi umum mengenai jenis umum keputusan, aturan, komitmen, dan fungsi jangka panjang dalam posisi internasional tersebut (Wish, 2014). Setelah peneliti melakukan analisis, dari 17 variasi peranan nasional milik Holsti yang penulis gunakan dan setelah melalui proses penelitian, penulis menemukan bahwa dalam permasalahan kudeta militer Myanmar Indonesia memiliki dua peranan. Peran nasional Indonesia diantaranya adalah *regional protector*, dan *mediator-integrator*.

1. Indonesia Sebagai *Regional Protector* dalam Upaya Penyelesaian Kudeta Militer Myanmar.

Regional protector bagi Holsti merupakan variasi peranan nasional urutan ketiga. *Regional protector* dijelaskan oleh holsti sebagai suatu konsepsi

peran yang terkesan seperti merujuk pada tanggung jawab suatu kepemimpinan atau pemimpin di suatu kawasan. Namun, dalam peranan ini tanggung jawab dan kepemimpinan hanya tersirat. Peranan negara pada *regional protector* menekankan pada pentingnya memberikan perlindungan bagi wilayah kawasan. Melalui pengertian tersebut dapat di simpulkan bahwasannya suatu negara dapat dikatakan sebagai regional protector ketika dalam suatu permasalahan yang terjadi ia merasa bahwa ia memiliki tanggung jawab untuk memberikan perlindungan bagi kawasannya, meskipun negara tersebut tidak memiliki tanggung jawab sebagai pemimpin kawasan yang sah. Indonesia dikategorisasikan sebagai *regional protector* karena Indonesia telah melakukan kebijakan yang mengindikasikan tanggung jawab akan perlindungan kawasan, kebijakan tersebut dilakukan dan dilihat ketika Indonesia melakukan pertemuan bilateral Indonesia-Malaysia, dan Indonesia berperan sebagai inisiator dalam *Asean Leaders Meeting*.

1.1. Pertemuan Bilateral Indonesia-Malaysia

Permasalahan yang terjadi di Myanmar telah mengakibatkan dampak pada kawasan. Kudeta militer yang telah terjadi sejak awal tahun 2021 tersebut mengakibatkan ancaman terhadap stabilitas kawasan. Hal ini dikarenakan oleh banyaknya pengungsi yang melakukan migrasi ke negara tetangga terdekat. Di lain sisi, pengungsi yang berasal dari Myanmar atau tepatnya etnis Rohingnya di negara bagian Rakhine, masih menjadi permasalahan yang belum terselesaikan hingga sekarang. Permasalahan yang terjadi pasca kudeta mengakibatkan bertambahnya jumlah pengungsi yang berasal dari Myanmar ke negara tetangga. Di kawasan ASEAN Thailand merupakan negara dengan jumlah pengungsi terbanyak. Pada tahun 2022, telah terdapat total 671.890 orang pengungsi yang berada di Thailand, 83% dari total jumlah pengungsi adalah Etnis Rohingnya, 16% adalah pengungsi dampak dari kudeta militer Myanmar, 1% sisanya adalah masyarakat yang bermigrasi layaknya para pengungsi (UNHCR, 2022). Apabila permasalahan yang terjadi di Myanmar tidak

dilakukan pencegahan atau upaya untuk memberhentikan teror dan kekerasan kemanusiaan yang dilakukan oleh tatmadaw terhadap rakyat Myanmar, maka angka pengungsi akan semakin membesar dan pelanggaran HAM di Myanmar akan terus terjadi.

Kejadian ini telah di wanti-wanti oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, hal ini dapat dilihat dari pembicaraan yang dilakukan oleh Presiden RI kepada PM Malaysia pada saat kunjungan yang dilakukan oleh Muhyiddin Yassin di Jakarta tanggal 5 Februari 2021. Presiden Joko Widodo dalam pertemuan tersebut menyatakan bahwa Indonesia merasa perihatin atas apa yang terjadi di Myanmar. Ia meminta kedua menteri luar negeri Indonesia dan menteri luar negeri Malaysia melakukan pembicaraan dengan *Chair of ASEAN* agar dilakukannya pertemuan khusus menteri luar negeri seluruh negara ASEAN. Hal ini bertujuan untuk membahas permasalahan di Myanmar dan meminta agar tidak lengah serta terus memberikan perhatian kepada permasalahan Rohingnya. Dalam pertemuan yang dilakukan tersebut Indonesia melalui Presiden Jokowi meminta agar permasalahan politik yang terjadi di Myanmar dapat diselesaikan sesuai dengan hukum yang berlaku. Ia juga menekankan bahwasannya sebagai negara anggota ASEAN sudah sepatutnya negara anggota menghormati prinsip-prinsip piagam ASEAN. Prinsip tersebut diantaranya adalah *prinsip rule of law*, demokrasi, hak asasi manusia, *good governance*, dan pemerintah yang konstitusional.

Melalui pertemuan yang dilakukan oleh Indonesia-Malaysia dapat disimpulkan Indonesia memiliki rasa tanggung jawab atas apa yang terjadi di Myanmar. Rasa tanggung jawab Indonesia diinterpretasikan melalui pembahasan serta pembicaraan mengenai perkembangan di Myanmar. Hal ini dibuktikan dengan permintaan yang disampaikan oleh Indonesia kepada kedua menteri luar negeri baik Indonesia dan Malaysia untuk melakukan pembicaraan dengan Ketua ASEAN mengenai permasalahan yang terjadi di ASEAN. Tidak hanya pembicaraan dengan Ketua ASEAN, Indonesia juga meminta agar dari

pembicaraan tersebut dapat dilakukannya pertemuan antar menteri luar negeri negara anggota ASEAN untuk membahas permasalahan politik Myanmar agar permasalahan tersebut dapat diselesaikan sejalan dengan hukum yang berlaku. Dalam tiap penekanan yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, dapat disimpulkan bahwa Indonesia memiliki kekhawatiran atas stabilitas kawasan yang nantinya akan dihadapi oleh ASEAN akibat dari kudeta militer Myanmar. Kemudian, melalui permintaan Indonesia yang dilakukan pada awal Februari, menjadikan Indonesia sebagai negara pertama yang menginisiasi penyelesaian kudeta militer Myanmar di kawasan ASEAN melalui mekanisme penyelesaian permasalahan ASEAN.

1.2. Indonesia Sebagai Inisiator ASEAN Leaders Meeting 2021

Setelah kedua menteri luar negeri memprakarsai pertemuan informal antar para menteri luar negeri seluruh negara anggota ASEAN. Indonesia melalui Presiden Joko Widodo melakukan pembicaraan dan mendorong Ketua ASEAN yakni sultan Hassanal Bolkiah untuk melakukan *ASEAN leader meeting*. ALM dilakukan khusus untuk membahas mengenai kudeta militer yang terjadi di Myanmar. Pertemuan yang terjadi bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan di Myanmar melalui mekanisme ASEAN guna melindungi rakyat Myanmar.

Dorongan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dinyatakan pada pernyataan presiden pada tanggal 19 Maret 2021. Dalam pernyataan presiden tersebut Presiden Jokowi menyatakan duka cita dan harapannya terhadap Myanmar. Ia juga menyatakan bahwa ia akan melakukan pembicaraan dengan ketua ASEAN agar diselenggarakan pertemuan tingkat tinggi ASEAN untuk membahas permasalahan Myanmar. Setelah didorong oleh Indonesia, ketua ASEAN mengundang seluruh pemimpin ASEAN untuk melakukan kegiatan pertemuan. Oleh karena itu, ALM kemudian berhasil dilaksanakan pada tanggal 24 April 2021 dan difasilitasi oleh Indonesia (ASEAN, 2021). Dalam pertemuan yang dilakukan tersebut, ASEAN turut menghadirkan Jendral Min Aung Hlaing

sebagai pemimpin junta yang melakukan kudeta terhadap Presiden terpilih Aung San Suu Kyi. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menghasilkan jalan keluar bagi permasalahan yang terjadi di Myanmar, dan menghasilkan lima poin konsensus yang juga disepakati oleh Min Aung Hlaing. Lima poin konsensus yang di sepakat diantaranya adalah (1) Junta militer harus menghentikan kekerasan dengan segera dan seluruh pihak yang terlibat harus menahan diri dengan sepenuhnya, (2) seluruh pihak harus melakukan dialog yang sifatnya konstruktif terkait pencarian solusi damai demi ketenangan rakyat Myanmar, (3) Proses dialog akan difasilitasi oleh Utusan khusus Ketua ASEAN dengan bantuan Sekretaris Jendral ASEAN, (4) Bantuan kemanusiaan yang diberikan oleh ASEAN akan diberikan melalui AHA Centre, (5) Utusan khusus dan Delegasi akan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan seluruh pihak terkait.

Dari lima poin konsensus yang disepakati dalam *ASEAN leader Meeting* tersebut, empat diantaranya diadopsi dari *statement* yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. *Statement* yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo diantaranya, pertama Perkembangan situasi di Myanmar tidak dapat di terima dan harus segera dihentikan, stabilitas, demokrasi dan perdamaian Myanmar harus segera di kembalikan, kepentingan rakyat Myanmar harus selalu menjadi prioritas utama. Kedua, Pimpinan militer Myanmar harus memberikan komitmen yaitu, penghentian penggunaan kekerasan oleh militer, dan seluruh pihak harus menahan diri, dialog inklusif harus di laksanakan, dan tahanan politik harus di lepaskan, dan pembentukan utusan khusus untuk mendorong dialog seluruh pihak di Myanmar. Ketiga, komitmen untuk pembukaan akses bantuan kemanusiaan dari ASEAN yang dikoordinir oleh sekjen ASEAN bersama AHA center.

Melalui pernyataan presiden, pelaksanaan ALM, adopsi atas pernyataan Presiden Joko Widodo serta penjelasan diatas, dapat di pahami bahwa suara serta pendapat Indonesia sangat diperhitungkan oleh ASEAN. Melalui

pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo diatas dapat dilihat bahwa Indonesia merasa permasalahan yang terjadi di Myanmar merupakan permasalahan serius yang harus diselesaikan oleh para pemimpin ASEAN. Indonesia juga menekankan keberpihakannya kepada rakyat Myanmar yang dibuktikan dari prioritas utama Indonesia dalam menjaga keselamatan dan kesejahteraan rakyat Myanmar. Maka dari itu, Indonesia mengajak ketua ASEAN yaitu Sultan Hassanal Bolkiah untuk melakukan KTT ASEAN atau ALM. Hal tersebut kemudian disetujui dan menghasilkan pertemuan ALM. Diperhitungkannya pendapat serta suara Indonesia juga dapat dilihat dan dibuktikan dari pendapat yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo yang tidak hanya dikonsiderasikan, melainkan dijadikan keputusan dalam pertemuan ALM. Dari lima poin yang dijadikan keputusan, empat poin diantaranya merupakan ide dan masukan dari Indonesia. ide dan masukan tersebut diantaranya adalah kekerasan harus dihentikan, permintaan untuk menahan diri bagi seluruh pihak di Myanmar, dilakukannya dialog inklusif, pembentukan utusan khusus, dan AHA Center sebagai perpanjangan tangan dalam menyalurkan bantuan. Dari masukan dan permintaan yang diberikan oleh Indonesia pada saat pertemuan yang khusus membahas mengenai penyelesaian permasalahan kudeta militer myanmar, maka dapat disimpulkan bahwa Indonesia merupakan pemimpin tersirat dalam penyelesaian kudeta militer Myanmar yang terjadi pada tahun 2021.

Selain hal yang tertera di atas, terdapat hal yang menjadikan Indonesia merasa bertanggung jawab atas perlindungan wilayah dan melindungi stabilitas di kawasan. Hal tersebut adalah tanggung jawab moral yang dimiliki oleh Indonesia dalam penyelesaian permasalahan atas kekerasan yang dilakukan oleh tatmadaw pada rakyat Myanmar. Tanggung jawab tersebut berasal dari prinsip bebas aktif yang dimiliki oleh Indonesia. Prinsip bebas aktif ini dicantumkan dalam Undang-Undang RI No. 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri BAB I, Pasal 3 yang berbunyi “Politik Luar Negeri menganut prinsip bebas aktif yang diabadikan untuk kepentingan nasional”. Pelaksanaan politik

luar negeri Indonesia didasarkan atas Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinia ke empat sebagai landasan konstitusional yang sekaligus menjadi tujuan nasional. Tujuan dari kebijakan luar negeri Indonesia tersebut diantaranya adalah untuk ikut melaksanakan ketertiban dunia, turut melaksanakan perdamaian dunia, serta keadilan sosial.

Politik bebas memiliki makna sebagai penentuan sikap Indonesia dan juga kebijaksanaan Indonesia dalam suatu permasalahan internasional dan dalam penentuan sikap atau kebijaksanaan tersebut tidak berdasarkan pada satu kekuatan dunia. Sedangkan, politik aktif dimaknai sebagai negara yang aktif dalam memberikan sumbangan dalam penyelesaian konflik, sumbangan tersebut dapat berupa pemikiran, ataupun partisipasi aktif Indonesia dalam permasalahan tersebut.¹ Pada permasalahan yang terjadi di Myanmar terkait kekerasan yang dilakukan oleh tatmadaw terhadap masyarakat sipil, Indonesia sebagai negara bebas aktif tidak dapat tetap hanya berdiam diri. Karena pada dasarnya Indonesia secara nilai telah terikat kepada ideologi yang berprinsip bebas aktif. Peran Indonesia dalam upaya penyelesaian konflik yang terjadi di Myanmar sudah sepatutnya merupakan kewajiban moral bagi Indonesia.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa Indonesia telah memmanifestasikan tujuan negara melalui pengimplementasian prinsip politik bebas aktif Indonesia. Prinsip yang sangat ditekankan dalam hal ini adalah prinsip politik aktif berupa sumbangan pemikiran serta sumbangan dalam bentuk partisipasi aktif Indonesia dalam penyelesaian permasalahan di Myanmar. Sumbangan pemikiran yang dilakukan oleh Indonesia berupa tiga poin pidato yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo dalam kegiatan ASEAN leader Meeting yang kemudian diadopsi menjadi empat poin dalam *five point consensus* yang disetujui ASEAN dalam upaya penyelesaian kudeta Militer Myanmar. Politik aktif Indonesia dalam bentuk partisipasi aktif dilihat dari inisiasi-inisiasi yang dikeluarkan oleh Indonesia baik itu inisiasi penyelesaian

¹ Penjelas atas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 Tentang Hubungan Luar Negeri Bab I pasal 3.

permasalahan yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dalam pertemuan bilateral bersama Malaysia pada tanggal 5 Februari 2021, maupun melalui pembicaraan antar Presiden Joko Widodo dengan Sultan Hassanal Bolkiah. Bentuk partisipasi aktif lainnya juga dilihat dari bantuan yang diberikan oleh Indonesia untuk rakyat Myanmar yang diserahkan melalui AHA Center dalam bentuk alat alat kesehatan.

2. Indonesia Sebagai Mediator-Integrator dalam Upaya Penyelesaian Kudeta Militer Myanmar

Mediator-integrator dalam tulisan Holsti memiliki makna sebagai suatu peranan di mana negara tersebut merasa dan menganggap bahwa mereka mampu atau bertanggung jawab dalam memenuhi atau melakukan tugas khusus sebagai penengah untuk mendamaikan ataupun menyelesaikan konflik di negara lain. Dalam kasus ini mereka percaya dan menganggap bahwa mereka merupakan penyelesai masalah di regional maupun global. Pada artikel yang ditulis oleh Holsti tersebut ia juga menekankan bahwa suatu negara tidak dapat dikatakan sebagai negara mediator-integrator ketika ia hanya mengeluarkan pernyataan bertanggung jawab atau melakukan mediasi hanya dalam satu krisis tertentu. Negara baru bisa dikatakan sebagai mediator-integrator ketika telah melakukan kegiatan secara berkelanjutan. Di lain sisi, di dalam penelitian yang telah Holsti lakukan, ia menemukan bahwasannya sebagian besar dari 71 sampel negara bagian yang ia teliti menyatakan bahwa mereka menganggap diri mereka mampu atau bertanggung jawab sebagai mediator-integrator dalam suatu permasalahan.

Sebelum Indonesia memiliki peranan dalam upaya penyelesaian permasalahan yang terjadi di Myanmar pada tahun 2021 Indonesia telah melakukan beberapa kebijakan yang bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan di kawasan. Khusus dalam permasalahan di Myanmar, Indonesia sebelumnya pernah menjadi satu-satunya negara yang mendapatkan akses masuk dari Myanmar untuk melakukan diskusi, serta mediasi dalam

penyelesaian permasalahan etnis Rohingnya. Indonesia melalui kebijakan luar negeri yang telah dilaksanakan, kemudian penulis mengkategorisasikan peran Indonesia sebagai *mediator-integrator* karena telah berhasil mengintegrasikan suara ASEAN melalui *shuttle diplomacy*, dan telah melakukan upaya mediasi dengan pihak-pihak Myanmar yakni pihak militer Myanmar dan pihak CRPH.

2.1. Shuttle Diplomacy Indonesia Kepada Negara Anggota ASEAN

Dalam kunjungan yang dilakukan oleh PM Malaysia ke Indonesia, pada tanggal 5 Februari 2021 Indonesia mengungkapkan rasa prihatin atas apa yang terjadi di Myanmar dan meminta melakukan pembicaraan dengan ketua ASEAN sebagai satu keluarga. Indonesia melalui Menteri Luar Negeri Retno Marsudi dalam *press briefing* yang diunggah pada laman kemlu.go.id menyatakan bahwa Indonesia menolak untuk berdiam diri atas kudeta yang terjadi di Myanmar serta kekerasan yang dialami oleh masyarakat Myanmar. Dalam *press briefing* tersebut, Menlu Retno mengatakan “Indonesia memilih untuk tidak berdiam diri. *To do nothing is not an option*”. Melalui pernyataan yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan Menteri Luar Negeri Indonesia pada awal terjadinya kudeta tersebut dapat diartikan bahwa Indonesia telah memutuskan untuk melakukan kebijakan yang mengindikasikan upaya penyelesaian permasalahan yang diakibatkan oleh kudeta militer Myanmar melalui mekanisme ASEAN.

Dalam upaya Indonesia melakukan kebijakan untuk menyelesaikan permasalahan, Indonesia dihalangi dengan perbedaan pendapat negara anggota ASEAN terhadap kudeta militer. Terdapat tiga bentuk respons dari negara-negara anggota ASEAN diantaranya Indonesia, Malaysia, dan Singapura sebagai negara yang menolak kekerasan dan bahkan mengecam tindakan junta. Kedua yaitu Filipina, Kamboja, dan Thailand menganggap bahwasanya permasalahan yang terjadi di Myanmar merupakan permasalahan internal yang tidak boleh diintervensi. Sementara itu Laos, Vietnam, dan Brunei Darussalam merupakan

negara yang memilih untuk tidak memberikan komentar terkait permasalahan yang terjadi di Myanmar. Hal ini mengakibatkan terhalangnya upaya penyelesaian masalah melalui mekanisme ASEAN karena kurangnya pro-aktif negara anggota dalam merespon dan ikut bersuara menyelesaikan permasalahan tersebut. Sejalan dengan komitmen Indonesia yang memilih untuk tidak bediam diri dalam hal ini, menjadikan Indonesia sebagai negara pertama dan negara satu-satunya negara anggota ASEAN yang melakukan *shuttle diplomacy* guna menyatukan pendapat negara anggota lainnya.

Upaya *shuttle diplomacy* yang dilakukan oleh Indonesia merupakan kebijakan luar negeri Indonesia yang bertujuan untuk mengintegrasikan pikiran, kesepahaman, dan suara negara anggota ASEAN serta menyampaikan rencana pertemuan menlu ASEAN. Upaya Indonesia dilakukan secara intensif bahkan di tengah pandemi Covid-19 yang sangat beresiko. *Shuttle diplomacy* dilakukan oleh Indonesia melalui pertemuan menlu negara anggota ASEAN baik secara langsung maupun melalui via telepon. Beberapa negara yang telah melakukan konsultasi dengan Indonesia melalui via telpon adalah menteri luar negeri Filipina, Malaysia, Singapura, Vietnam, Laos, dan Kamboja. Sedangkan negara yang melakukan konsultasi secara langsung dan tatap muka adalah Brunei Darussalam, Singapura, Thailand.

Negara tujuan Indonesia dalam melakukan *shuttle diplomacy* pertama adalah Brunei Darussalam yang merupakan pemimpin ASEAN pada saat itu. Menlu Retno melakukan pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Brunei Darussalam Dato Erywan, pada tanggal 16 Februari 2021. Dalam pertemuan tersebut Menlu Retno membahas mengenai perkembangan situasi Myanmar dan bagaimana ASEAN dapat berperan untuk membantu menyelesaikan permasalahan yang terjadi. setelah melakukan pertemuan, Menlu retno melakukan kunjungan kehormatan kepada Sultan Brunei Darussalam. Diakhir press briefing yang dilakukan oleh Menlu Retno Ia menekankan bahwa Indonesia akan terus melanjutkan upayannya untuk terus berkontribusi dalam

mencari solusi yang terbaik bagi upaya menjaga stabilitas, menjaga keamanan, serta menjaga perdamaian kawasan.

Negara tujuan Indonesia yang kedua adalah Singapura. Indonesia melakukan kunjungan kepada Singapura pada tanggal 18 Februari 2021. Pertemuan yang dilakukan oleh Menlu Retno membahas permasalahan yang sama dengan pembahasan yang dilakukan dengan Brunei Darussalam yaitu melakukan pertukaran pikiran mengenai perkembangan situasi di Myanmar. Dari pertemuan tersebut kedua negara sepakat untuk mengambil peran untuk memfasilitasi dialog konstruktif untuk mengembalikan stabilitas di Kawasan (Singapore, 2021). Pada pertemuan yang dilakukan oleh Indonesia dan Singapura, telah disampaikan rencana untuk melakukan pertemuan menteri luar negeri negara anggota ASEAN.

Negara tujuan kunjungan menlu Retno selanjutnya adalah Thailand. Indonesia berhasil melakukan pertemuan di Bangkok Thailand, pada tanggal 24 Februari 2021 (Singapore, 2021). Pembahasan yang dilakukan masih sama dengan beberapa kunjungan yang dilakukan oleh menlu Retno pada kunjungan sebelumnya. Dalam kasus ini Thailand memiliki kondisi yang berbeda, di mana Thailand memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan Myanmar dan hampir 2 juta masyarakat Myanmar tinggal Thailand. Melalui pertemuan bilateral Indonesia-Thailand, Indonesia kembali menekankan posisinya dalam permasalahan yang terjadi di Myanmar, dan telah mengkomunikasikan mengenai rencana pertemuan menteri luar negeri ASEAN dan telah di sepakati oleh Thailand.

Melalui *shuttle diplomacy* yang dilakukan oleh Indonesia dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia bersungguh sungguh dalam upaya pengintegrasian pandangan ataupun pikiran negara anggota ASEAN. Dalam upaya Indonesia yang dilakukan di tengah keadaan pandemi, Indonesia tetap mengunjungi beberapa negara guna menyamakan pemikiran negara anggota ASEAN dalam penyelesaian kudeta militer Myanmar. Pemberhentian *shuttle diplomacy*

pertama Indonesia adalah Brunnei Darussalam yang merupakan ketua ASEAN. kunjungan pertama Indonesia ke Brunnei Darussalam merupakan tujuan utama, karena Brunnei memiliki hak yang sah untuk memimpin kawasan. Apabila Brunnei telah memiliki pemikiran yang sama dengan Indonesia, maka setiap upaya yang dilakukan guna menyelesaikan kudeta militer Myanmar akan lebih mudah untuk dilaksanakan. Setelahnya, kunjungan dilakukan oleh Indonesia dengan Singapura, dalam pertemuan tersebut Indonesia mendapatkan dukungan dari Singapura melalui pernyataan yang dikeluarkan oleh Menlu Vivian yang menyatakan bahwa Singapura akan mengambil peran dalam permasalahan Myanmar. Terakhir, Indonesia melakukan kunjungan ke Thailand yang merupakan negara yang memilih untuk tidak mengintervensi permasalahan di Myanmar. Namun, Thailand merupakan negara yang berbatasan langsung dengan Myanmar, serta merupakan negara paling terdampak akibat kudeta militer Myanmar.

Pertemuan Indonesia dengan negara ASEAN dikatakan berhasil, karena ketiga negara di atas menghadirkan pemimpin negara dalam pertemuan ALM yang dilaksanakan di Indonesia. Thailand yang pada awalnya memutuskan untuk tidak ingin ikut campur atas permasalahan di Myanmar pada akhirnya ikut bergabung dalam ALM. Brunnei Darussalam selaku Ketua ASEAN yang awalnya memilih untuk tidak memberikan komentar terkait kudeta militer Myanmar justru memiliki pemikiran yang sama dengan Indonesia dan menyetujui pertemuan ALM yang dilaksanakan di Jakarta.

2.2. Upaya Mediasi Indonesia dengan Militer Myanmar dan CRPH

Setelah melakukan pertemuan dengan Menlu Thailand, Indonesia memiliki rencana untuk melakukan kunjungan ke Myanmar guna mengkomunikasikan posisi Indonesia dalam permasalahan yang terjadi kepada seluruh pihak di Myanmar, baik itu pihak *Committee of Representing Pyidaungsu Hluttaw* (CRPH) yang merupakan para pemimpin NLD yang digulingkan oleh junta pada

saat kudeta maupun pihak junta militer Myanmar. Dalam rencana pertemuan tersebut Indonesia berencana untuk menyampaikan dan mengkomunikasikan pesan dunia internasional terkait harapan penyelesaian masalah agar dapat diselesaikan dengan segera. Namun, rencana kunjungan tersebut dibatalkan karena terdapat banyak kesalah pahaman dan banyak di tentang. Batalnya kunjungan yang dilakukan oleh Indonesia mengharuskan proses komunikasi dilakukan melalui via telepon. Namun, pada saat Indonesia masih berada di Thailand, Indonesia diberi tahu bahwa Menteri Luar Negeri U Wunna Maung Lwing yang merupakan menteri bagi Junta secara kebetulan juga tengah berada di Thailand. Keduanya berhasil melakukan pertemuan singkat di bandara Don Muang ditemani oleh menlu Thailand.

Dalam pertemuan singkat tersebut Indonesia menjelaskan bahwa Indonesia bersama dengan rakyat Myanmar. Indonesia khawatir terhadap perkembangan situasi di Myanmar, sehingga meminta seluruh pihak untuk menahan diri karena keselamatan dan kesejahteraan rakyat merupakan prioritas utama dalam kasus ini. Menlu Retno juga menekankan perlunya dialog rekonsiliasi guna membangun kepercayaan serta menekankan pentingnya proses transisi demokrasi yang inklusif. Menlu retno menyampaikan pentingnya akses kepada para tahanan politik Myanmar. Menlu retno juga menyampaikan kepada Menteri Luar Negeri U Wunna pentingnya penghormatan dari seluruh anggota ASEAN terhadap prinsip-prinsip yang tercantum dalam piagam ASEAN.

Indonesia dikatakan sebagai negara yang telah melakukan mediasi kepada pihak yang ada di Myanmar, meski mediasi yang dilakukan tidak membuahkan hasil yang signifikan. Mediasi yang dilakukan oleh Indonesia tetap menjadi salah satu kebijakan dan upaya yang dilakukan guna untuk menyelesaikan kudeta militer Myanmar. Hal ini dilihat melalui rencana kunjungan yang akan di lakukan oleh Indonesia tepat setelah melakukan kunjungan dari Thailand, namun upaya tersebut tidak diterima oleh banyak pihak akibat kesalah pahaman yang terjadi. kesalah pahaman terjadi karena

Junta militer telah melakukan kudeta dan duduk di pemerintahan sehingga apabila Indonesia melakukan kunjungan, maka Indonesia secara tidak langsung mendatangi pemerintahan Myanmar yang sedang dijalankan oleh junta. Rencana kedatangan Indonesia tersebut disalah pahami sebagai bentuk legitimasi pemerintahan Myanmar oleh pemerintah Indonesia. Namun hal tersebut tidak menjadi penghalang bagi Indonesia untuk melakukan komunikasi antar kedua belah pihak di Myanmar. Indonesia dengan CRPH masih melakukan komunikasi dengan lancar meski hanya melalui komunikasi via telepon, sedangkan komunikasi yang dilakukan dengan militer Myanmar dapat dilakukan secara langsung. Indonesia berhasil melakukan pertemuan secara mendadak di salah satu bandara Thailand, ditemani oleh Menlu Thailand. Dalam pertemuan tersebut Indonesia menjelaskan posisinya, menyampaikan pesan dan kekhawatiran nasional maupun Internasional, juga dalam pertemuan itu Menlu menyampaikan tuntutan untuk menghormati Piagam ASEAN. Upaya komunikasi yang dilakukan oleh Indonesia kemudian dapat dikategorisasikan sebagai bagian dari *mediator-integrator* karena Indonesia telah mencoba untuk menjadi penengah melalui komunikasi antar pihak. Upaya komunikasi yang dilakukan oleh Indonesia ini juga merupakan bentuk dari rasa tanggung jawab Indonesia dalam menyelesaikan kudeta militer Myanmar yang merugikan banyak pihak.

Setelah melakukan *shuttle diplomacy* serta upaya mediasi terhadap pihak-pihak di Myanmar, Indonesia dan Malaysia memprakarsai pertemuan informal menteri luar negeri seluruh anggota ASEAN. Pertemuan tersebut dilaksanakan secara daring pada tanggal 2 Maret 2021 dan secara khusus membahas mengenai permasalahan yang ada di Myanmar. Melalui press briefing Menlu RI yang di unggah pada halaman youtube, dalam pertemuan tersebut Indonesia hanya menyampaikan satu isu yakni mengenai perkembangan di Myanmar. Beberapa hal yang disampaikan oleh Indonesia mengenai isu Myanmar diantaranya adalah rasa prihatin terhadap kekerasan yang telah memakan banyak korban, dan menyatakan bahwa hal tersebut sangat mengkhawatirkan

karena penangkapan rakyat sipil yang terus dilakukan, dapat menjadi kemunduran bagi proses transisi demokrasi di Myanmar, juga dapat mengancam perdamaian dan keamanan di kawasan apabila terus terjadi.

Setelah melakukan pertemuan informal antar menteri luar negeri ASEAN Indonesia menjadi negara yang memfasilitasi ALM, pada tanggal 24 April 2021 di Jakarta setelah Sultan Brunei Darussalam Hassanal Bolkiah selaku ketua ASEAN mengundang negara anggota untuk melakukan *ASEAN Leaders Meeting* atau ALM. Setelah dilaksanakannya ALM dan pencapaian kesepakatan melalui lima poin konsensus. Setelah komitmen yang dihasilkan bersama, ternyata Myanmar tidak memberikan perubahan secara signifikan atas poin-poin konsensus tersebut.

Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Indonesia guna meredam dan menyelesaikan kudeta militer Myanmar namun Kudeta militer justru tidak mencapai titik terang. Semakin banyak korban berjatuhan dan pemerintah myanmar justru mendeklarasikan diri sebagai pemerintahan yang sah dan mengakibatkan perang saudara di Myanmar seperti yang telah di jelaskan dalam kudeta militer Myanmar tahun 2021 yang tertera pada bab dua. Meskipun demikian, dalam hal ini Indonesia tidak berhenti melakukan upaya tidak langsungnya untuk menekankan penyelesaian kudeta di Myanmar.

Dalam upaya Indonesia untuk menyelesaikan permasalahan, konflik dan isu kemanusiaan yang terjadi di Myanmar. Indonesia melakukan kebijakan yang bertujuan untuk melindungi rakyat Myanmar. Sebagai bentuk rasa tanggung jawab untuk melindungi masyarakat Myanmar yang sedang berada di tengah krisis kemanusiaan. Indonesia kemudian memberikan bantuan kemanusiaan pada Myanmar.

Pada tanggal 20 September 2021, Indonesia memberikan bantuan kemanusiaan senilai 200,000 USD melalui AHA Center. Bantuan yang di berikan bukan dalam bentuk uang melainkan dalam bentuk barang-barang kesehatan yang diproduksi oleh Indonesia seperti masker KN95, sarung tangan

medis, dan APD atau alat pelindung diri. Hal ini dilakukan agar dapat mengurangi dampak krisis di Myanmar yang semakin parah akibat permasalahan yang terjadi tengah berada dalam situasi pandemi global COVID-19. Upaya lainnya yang dilakukan Indonesia dilihat dari kebijakan Indonesia untuk tidak mengikut sertakan Myanmar dalam BDF.

Sebagai bentuk ketidak patuhan militer Myanmar terhadap lima poin konsesnsus yang telah di sepakati Indonesia yang merupakan sahabat lama untuk pertama kalinya tidak mengundang Myanmar dalam kegiatan BDF tahun 2021. Direktur Jendral Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Luar Negeri RI Teuku Faizyah menyebutkan hal tersebut dilakukan karena karena Indonesia memandang bahwa belum ada pemerintah defenitif yang dapat merepresentasikan pemerintah sah dari Myanmar. Melalui Pengecualian Myanmar dalam *Bali Democracy Forum* yang diselenggarakan pada tahun 2021 dapat disimpulkan bahwa Indonesia menolak dan tidak mengakui Junta militer Myanmar sebagai pemimpin negara yang sah meskipun junta telah mendeklarasikan dirinya sebagai pimpinan Myanmar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa Indonesia masih menuntut permasalahan Myanmar di selesaikan secara tuntas.

Tidak berhenti disitu, setelah pertemuan *retreat* menu ASEAN yang dilaksanakan di Phnom Penh, Kamboja, pada 17 Februari 2022 Menlu Retno melakukan Press Briefing di saluran *youtube* MoFA Indonesia. Dalam Press Briefing yang dilakukukan, Indonesia membahas mengenai hasil pertemuan *retreat* Menu ASEAN, dimana di dalam pertemuan tersebut Indonesia menekankan pengimplementasian *five point consensus* yang telah di sepakati. Dalam pertemuan tersebut Indonesia menyampaikan bahwa Indonesia sangat menekankan pentingnya *five point consensus* yang telah dihasilkan pada saat pertemuan ALM. *Five point consensus* yang tidak diimplementasikan akan mengakibatkan dampak bagi stabilitas kawasan. Tidak hanya stabilitas kawasan, tetapi pengimplementasian *five point consensus* juga menjadi penentu bagi

kredibilitas ASEAN sebagai organisasi kawasan yang memayungi Myanmar. Indonesia juga menekankan pentingnya bantuan kemanusiaan untuk terus diberikan agar dapat disalurkan kepada seluruh pihak yang memerlukan bantuan.

Melalui dua poin di atas, Indonesia dapat dikategorisasikan sebagai negara yang memiliki peranan *mediator-integrator* dalam upaya penyelesaian kudeta militer Myanmar tahun 2021. Hal ini dilihat melalui upaya mediasi dan upaya yang dilakukan Indonesia dalam menjadi mediator bagi dua pihak yang memiliki permasalahan. kedua pihak yang dimaksudkan disini adalah militer Myanmar dan CRPH. Upaya mediasi yang dilakukan oleh Indonesia adalah melakukan komunikasi dengan kedua belah pihak meskipun komunikasi tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung dan tidak dapat dikatakan mengalami keberhasilan. Upaya komunikasi hanya dapat dilakukan oleh Indonesia kepada menlu Myanmar bagi junta secara singkat di bandara Thailand, sedangkan komunikasi dengan CRPH hanya dilakukan melalui via telepon. Indonesia sebagai integrator dilihat dari bagaimana Indonesia berhasil mengintegrasikan dan menyamakan pikiran serta pendapat negara anggota ASEAN dalam permasalahan di Myanmar sehingga berhasil menyepakati lima poin konsensus.

Tidak hanya melalui dua poin di atas, sebagai tambahan mengapa Indonesia juga dikatakan sebagai *mediator-integrator* karena Indonesia tidak hanya melakukan upaya mediasi dalam permasalahan di kawasan pada saat kudeta militer Myanmar tahun 2021 saja, melainkan terdapat banyak upaya mediasi yang telah dilakukan oleh Indonesia. Mediasi yang pernah dilakukan oleh Indonesia sebelumnya adalah pada permasalahan di Filipina yakni antar pemerintah filipina dengan MNLF, kemudian permasalahan Kamboja-Thailand, serta di Myanmar sendiri Indonesia pernah menjadi satu-satunya negara yang memiliki akses untuk menyelesaikan permasalahan etnis Rohingnya. Hal ini mengindikasikan bahwa Indonesia telah melakukan mediasi di kawasan, dan

tidak hanya melakukan mediasi dalam satu krisis tertentu saja. Kemudian, Indonesia secara tidak langsung menyatakan bertanggung jawab atau mengatakan akan berperan dalam penyelesaian permasalahan melalui pernyataan pers yang dikeluarkan oleh Indonesia. Tidak hanya itu saja, Indonesia juga melakukan kegiatan secara nyata secara terus menerus dan berkelanjutan. Berkelanjutan dapat dibuktikan dari kebijakan yang dikeluarkan oleh Indonesia mulai dari permintaan presiden RI dalam pertemuan bilateral, *shuttle diplomacy*, pertemuan informal menlu ASEAN, inisiasi ASEAN Leaders Meeting, fasilitator dalam ALM, pemberian bantuan kepada Myanmar melalui AHA Center, mengeluarkan kebijakan untuk tidak mengundang Myanmar dalam BDF, dan menekankan pengimplementasian five point consensus dalam pertemuan *retreat* Menlu ASEAN pada tahun 2022.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Antuli, Rezky Ramadhan, Dudi Heryadi, and Teuku Rezasyah. "Analisis Peran Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik Thailand Dan Kamboja Melalui Pendekatan National Role Conception Analysis." *JUPIIS : Jurnal Pendidikan Ilmu-ilmu Sosial* 11, no. 2 (2019): 449–459.
- Dermawan, Windy. "Indonesia Constructive Engagement To Support Democracy in Myanmar." *Jurnal Wacana Politik* 1, no. 2 (2016): 166–174.
- Setiawan, Ipung Pramudya, and Made Selly Dwi Suryanti. "Keterlibatan Asean Dalam Menangani Konflik Myanmar (Studi Kasus: Konflik Etnis Rohingya 2017 – 2019)." *POLITICOS: Jurnal Politik dan Pemerintahan* 1, no. 2 (2021): 83–97.

Buku

- Acharya, Amitav. "Indonesia and The Regional Architecture." In *Indonesia Matters: Asia's Emerging Democratic Power*, 1–136. 1st ed. Singapore: World Scientific, 2014.
- Alunaza SD, Hardi, and Dewa Anggara. "Peran Indonesia Dalam Upaya Penyelesaian Konflik Antara Pemerintah Filipina Dan Moro Nationalism Liberation Front (MNLF)." *Indonesian Perspective* 3, no. 1 (2018): 52.

- Holsti, K J. "National Role Conceptions in the Study of Foreign Policy." *International Studies Quarterly* 14, no. 3 (April 5, 1970): 233–309.
- Wehner, Leslie E, and Cameron G Thies. "Role Theory , Narratives , and Interpretation : The Domestic Contestation of Roles 1" (2014): 411–436.
- Wish, Naomi Bailin. "Policy Makers and Foreign National Role Conceptions Their" 24, no. 4 (2014): 532–554.

Website

- Bbc.com. "Kudeta Myanmar: Barat Mengecam, Indonesia Dan Tiga Negara ASEAN Minta Konflik Diselesaikan Melalui 'mekanisme Hukum' Dan 'Dialog Yang Damai.'" *Www.Bbc.Com*. Last modified 2021. Accessed March 18, 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-55887214>.
- cnnindonesia.com. "Jokowi Dukung Lima Konsensus Soal Myanmar Dari KTT ASEAN." *Cnnindonesia*. Jakarta, April 25, 2021. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20210425074829-106-634379/jokowi-dukung-lima-konsensus-soal-myanmar-dari-ktt-asean>.
- Eka Yudha Saputra. "Min Aung Hlaing Klaim Posisi Perdana Menteri Pemerintahan Sementara Myanmar." *Dunia.Tempo.Co*. Last modified 2021. Accessed March 17, 2022. <https://dunia.tempo.co/read/1489941/min-aung-hlaing-klaim-posisi-perdana-menteri-pemerintahan-sementara-myanmar>.
- idntimes.com. "Kronologi Lengkap Kudeta Myanmar Yang Picu Demo Berdarah." *Www.Idntimes.Com*. Last modified 2021. Accessed March 17, 2022. <https://www.idntimes.com/news/world/rehia-indrayanti-br-sebayang/kronologi-lengkap-kudeta-myanmar-yang-picu-demo-berdarah/5>.
- Jaya, Aditya iswara. "Korban Sipil Tewas Di Kudeta Myanmar Capai Lebih Dari 700 Orang." *Www.Kompas.Com*. Last modified 2021. Accessed February 12, 2022. <https://www.kompas.com/global/read/2021/04/11/152750770/korban-sipil-tewas-di-kudeta-myanmar-capai-lebih-dari-700-orang>.
- Kompas.com. "Kudeta Militer Myanmar Ini Rentetannya Dari Hasil Pemilu Yang Dituduh Curang." *Kompas.Com*. Last modified 2021. Accessed March 16, 2022. <https://www.kompas.com/global/read/2021/01/30/135022870/kudeta-militer-myanmar-ini-rentetannya-dari-hasil-pemilu-yang-dituduh?page=all>.
- Saju, Pascal S. Bin. "Thein Sein Beri Jusuf Kalla Akses Ke Rohingya."

Kompas.Com. Last modified 2012. Accessed June 10, 2022.
<https://travel.kompas.com/read/2012/08/10/22270413/thein.sein.beri.jusuf.kalla.akses.ke.rohingya>.

Setkab.go.id. “Diprakarsai Indonesia, Pemimpin ASEAN Akan Gelar Pertemuan Bahas Situasi Di Myanmar.” *Setkab.Go.Id*. Last modified 2021. Accessed February 22, 2022. <https://setkab.go.id/diprakarsai-indonesia-pemimpin-asean-akan-gelar-pertemuan-bahas-situasi-di-myanmar/>.

———. “Pernyataan Pers Bersama Presiden Republik Indonesia Dan Perdana Menteri Malaysia, 5 Februari 2021, Di Istana Merdeka, Provinsi DKI Jakarta.” *Setkab.Go.Id*. Last modified 2021. Accessed March 26, 2022. <https://setkab.go.id/pernyataan-pers-bersama-presiden-republik-indonesia-dan-perdana-menteri-malaysia-5-februari-2021-di-istana-merdeka-provinsi-dki-jakarta/>.

UNHCR. “Thailand Multi-Country Office.” *Www.Unhcr.Org*. Last modified 2022. Accessed July 8, 2022. <https://reporting.unhcr.org/thailand#toc-latest-updates>.

Report

ASEAN Secretariat. “Chairman’s Statement on the ASEAN Leaders’ Meeting 24 April 2021.” *Asean.Org*, 2021.

Kemlu.go.id. “Kontribusi Indonesia Senilai USD 200.000 Untuk Bantuan Kemanusiaan ASEAN Kepada Myanmar Mulai Didistribusikan Akhir September 2021.” *Kemlu.Go.Id*. Last modified 2021. Accessed June 25, 2021. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2943/berita/kontribusi-indonesia-senilai-usd-200000-untuk-bantuan-kemanusiaan-asean-kepada-myanmar-mulai-didistribusikan-akhir-september-2021>.

———. “Kunjungan Menlu RI Ke Brunei Darussalam.” *Kemlu.Go.Id*. Last modified 2021. Accessed February 20, 2022. <https://kemlu.go.id/bandarseribegawan/id/news/11206/kunjungan-menlu-ri-ke-brunei-darussalam>.

———. “Press Briefing Menteri Luar Negeri Mengenai Hasil Kunjungan Ke Bangkok 24 Februari 2021.” *Kemlu.Go.Id*. Last modified 2021. Accessed February 20, 2022. <https://kemlu.go.id/portal/id/read/2192/berita/press-briefing-menteri-luar-negeri-mengenai-hasil-kunjungan-ke-bangkok-24-februari-2021>.

Ministry of Foreign Affairs Singapore. “Minister for Foreign Affairs Dr Vivian Balakrishnan’s Meeting with Minister of Foreign Affairs of the Republic of

Indonesia Retno Marsudi, 18 February 2021,” 2021.

<https://www.mfa.gov.sg/Newsroom/Press-Statements-Transcripts-and-Photos/2021/02/20210218-Meeting-with-Indonesia-FM>.

MoFA Indonesia. “Press Briefing Menlu RI: Hasil Pertemuan Retreat Menlu ASEAN Di Phnom Penh, Kamboja.” *Youtube.Com*, 2021.

<https://www.youtube.com/watch?v=mFlITzqRBWY>.

———. “Press Briefing Menlu RI: Informal ASEAN Foreign Minister’s Meeting, 2 Maret 2021.” Jakarta, Indonesia: Youtube, 2021.

https://youtu.be/xIDL_akeras%0Ahttps://www.youtube.com/watch?v=bBC-nXj3Ng4%0Ahttps://youtu.be/_160oMzblY8.

Sekretariat Presiden. “Pernyataan Presiden RI Terkait Situasi Myanmar, Istana Kepresidenan Bogor, 19 Maret 2021.” *Youtube.Com*, 2021.

<https://www.youtube.com/watch?v=mFlITzqRBWY>.

“Kunjungan Menlu RI Ke Brunei Darussalam,” 2021.

<https://www.youtube.com/watch?v=Tymyee8qrKs>.